

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka konsistensi sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil yang diangkat dari tenaga honorer dengan calon pegawai negeri sipil yang diangkat secara reguler, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007;
- bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pegawai Negeri Sispil Yang Diangkat Dan Tenaga Honorer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972, tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

6

1

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

7.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

œ

- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2004;
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER.

asal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer, diubah sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal

- (2) Aspek lain yang tidak diatur dalam Peraturan ini berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II, dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III".
- Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer, pada butir III tentang Deskripsi Mata Diklat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"III. Deskrispi Mata Diklat

Deskripsi Mata Diklat Prajabatan untuk CPNS ex-Honorer Golongan I dan II; dan Golongan III pada dasarnya sama dengan deskripsi Mata Diklat Prajabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II; dan Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III.

Khusus deskripsi Mata Diklat Kepemerintahan Yang Alah, Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

w

A. Deskripsi Mata Diklat Prajabatan Golongan I dan

Kepemerintahan Yang Baik

Deskripsi Singkat

kepemerintahan yang baik yang lebih menekankan pada pembahasan prinsip-prinsip dan bagaimana aplikasi prinsip-prinsip tersebut Mata Diklat ini membahas tentang deskripsi dalam tugas-tugas jabatan PNS.

Pengalaman Belajar

seperti pendalaman materi secara mandiri, terstruktur seperti ceramah, diskusi, tanya Melalui metode pembelajaran mulai dari yang Selanjutnya peserta menuangkan kompetensi pengetahuannya di bidang ini sebagai hasil dipergunakannya Diklat ini untuk memperoleh pengetahuan role play sampai pada yang tidak terstruktur jawab, praktek, latihan, permainan/games, pembelajaran berikutnya dan dunia kerja pengetahuan dalam kegiatan-kegiatan mata Kepemerintahan Yang Baik (RM-17). dan perilaku baru yang akan mengeksplorasi dalam untuk resume nilai-nilai mengikut

c Hasil Belajar

Kepemerintahan yang Baik beserta prinsipkerja penerapannya. prinsipnya serta mampu merancang kerangka Peserta mampu menjelaskan pengertian

٩ Indikator Hasil Belajar menjelaskan

1) Mampu

pengertian

- 2) Mampu menjelaskan dan menguraikan kepemerintahan yang baik.
- ω prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. memberikan conton-conton

yang baik dalam tugas jabatan PNS. penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan

S

- Mampu merancang yang baik. penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan kerangka kerja
- 5) Mampu kepeme-rintahan yang baik menerapkan prinsip-prinsip

e. Materi Pokok

- Konsepsi Kepemerintahan yang Baik;
- Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik;
- Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan Contoh-contoh Penerapan Prinsip-prinsip
- 5) Permasalahan dalam penerapan Kepemerintahan yang Baik; Kepemerintahan yang Baik.

Waktu

4 (empat) Sesi (12 Jampel)

Ö Media Pembelajaran

- 1) OHP/OHT;
- 100;
- Slide; Flipchart;
- Papan Tulis

Percepatan Pemberantasan Korupsi

Deskripsi Singkat

peraturan, strategi dan implementasi percepatan seputar korupsi. pemberantasan korupsi di Indonesia, serta Mata Diklat ini membahas tentang konsep, penyebab dan permasalahan-permasalahan

b. Pengalaman Belajar

sampai pada yang tidak terstruktur seperti memperoleh pengetahuan, sikap dan perilaku dalam kegiatan-kegiatan mata Diklat ini untuk mengeksplorasi nilai-nilai dan pengetahuan pendalaman materi secara mandiri, peserta praktek, latihan, permainan/games, role play terstruktur seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, baru yang akan dipergunakannya Melalui metode pembelajaran mulai dari yang untuk

kompetensi pengetahuannya di bidang ini Percepatan Pemberantasan Korupsi (RM-18). sebagai hasil belajar ke dalam resume materi mengikuti pembelajaran berikutnya dan dunia Selanjutnya peserta menuangkan

c. Hasil Belajar

permasalahan seputar korupsi, sehingga peserta pemberantasan korupsi pada bidang tugasnya. Peserta mampu menjelaskan konsep, peraturan, implementasi, merancang penyebab langkah-langkah

d. Indikator Hasil Belajar

- 1) Mampu menjelaskan konsep percepatan anti korupsi.
- 2) Mampu menjelaskan peraturan korupsi yang berlaku di Indonesia. tentang
- Mampu menjelaskan percepatan anti korupsi. strategi program
- Mampu menjelaskan permasalahan seputar korupsi. penyebab
- Mampu pemberantasan korupsi dan menerapkannya sesuai bidang tugasnya. merancang langkah-langkah

Materi Pokok

- 1) Konsepsi percepatan anti korupsi;
- Peraturan perundang-undangan tentang korupsi;
- Strategi dan program percepatan anti korupsi;
- Penyebab dan permasalahan korupsi;
- Aplikasi pemberantasan korupsi.

Waktu

4 (empat) Sesi (12 Jampel)

Media Pembelajaran

- OHP/OHT;
- LCD;
- Slide;
- 54865 Flipchart;
- Papan Tulis.

3. Pola Pikir (Mind Setting) Pegawai Negeri Sipil

Deskripsi Singkat

dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan PNS, dan pentingnya peranan pola pikir tersebut Pegawai Negeri Sipil yang harus dimiliki setiap Mata Diklat ini membahas tentang pola pikir pemerintah yang kuat. kepada masyarakat dan pembentukan birokrasi

Ģ. Pengalaman Belajar

sampai pada yang tidak terstruktur seperti praktek, latihan, permainan/games, role play terstruktur seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, memperoleh pengetahuan, sikap dan perilaku dalam kegiatan-kegiatan mata Diklat ini untuk mengeksplorasi nilai-nilai dan pengetahuan pendalaman materi secara mandiri, peserta Melalui metode pembelajaran, mulai dari yang mengikuti pembelajaran berikutnya dan dunia baru yang akan dipergunakannya Nilai-nilai (LKN) yang akan diterapkan ditempat sebagai hasil belajar berupa Lembaran Komitmen kompetensi pengetahuannya di bidang ini Selanjutnya peserta untuk

Hasil Belajar

mengatasi hambatan-hambatan memiliki pola pikir sebagai PNS, dan mampu Peserta mampu merancang kerangka kerja untuk dihadapi dalam penerapannya. yang akan

d. Indikator Hasil Belajar

- 1) Mampu menjelaskan konsepsi dasar pola
- Mampu menjelaskan beberapa jenis pola pikir dalam dunia profesi.
- Mampu menjelaskan pola pikir PNS.
- Mampu perubahan pola pikir. mempraktekkan teknik-teknik
- Mampu merancang perubahan pola pikir.
- Mampu mengubah pola pikir.



Materi Pokok

0

- Konsepsi Dasar Pola Pikir;
- Jenis-jenis Pola Pikir dalam dunia Profesi;
- Pola Pikir PNS;
- Teknik-teknik mengubah Pola Pikir;
- Aplikasi Perubahan Pola Pikir;
- Permasalahan dalam mengubah Pola Pikir.

f. Waktu

8 (delapan) Sesi (24 Jampel)

ø Media Pembelajaran

- OHP/OHT;
- Slide; LCD;
- Flipchart;
- Papan Tulis

Deskripsi Mata Diklat Prajabatan Golongan III

œ

a. Deskripsi Singkat

Kepemerintahan Yang Baik

menekankan pada pembahasan kepemerintahan yang baik yang lebih prinsip tersebut dalam tugas-tugas jabatan prinsip serta bagaimana aplikasi prinsip-Mata Diklat ini membahas tentang deskripsi prinsip-

b. Pengalaman Belajar

seperti pendalaman materi secara mandiri, role play sampai pada yang tidak terstruktur jawab, praktek, latihan, permainan/games, terstruktur seperti ceramah, diskusi, tanya Melalui metode pembelajaran mulai dari yang pengetahuannya di bidang ini sebagai hasi pembelajaran berikutnya dan dunia kerja Diklat ini untuk memperoleh pengetahuan, pengetahuan dalam kegiatan-kegiatan mata peserta mengeksplorasi nilai-nilai Selanjutnya peserta menuangkan kompetens dipergunakannya dan perilaku baru yang untuk mengikuti akan

9

Kepemerintahan Yang Baik (RM-17). dalam resume materi

c. Hasil Belajar

prinsipnya serta mampu merancang kerangka Kepemerintahan yang Baik beserta prinsip-Peserta mampu menjelaskan pengertian kerja penerapannya.

d. Indikator Hasil Belajar

- 1) Mampu kepemerintahan yang baik. menjelaskan pengertian
- 2) Mampu menjelaskan dan menguraikan Mampu prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. memberikan conton-conton
- 4) Mampu penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam tugas jabatan PNS. penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. merancang kerangka kerja
- 5) Mampu menganalisis dan mengatasi permasalahan dalam penerapan prinsipprinsip kepemerintahan yang baik.

ē **Materi Pokok**

- Konsepsi Kepemerintahan yang Baik;
- Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik;
- Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik;
- Contoh-contoh Penerapan Prinsip-prinsip Analisis dan permasalahan dalam penerapan Kepemerintahan yang Baik Kepemerintahan yang Baik;

f. Waktu

4 (empat) Sesi (12 Jampel)

g. Media Pembelajaran

- 2) (CD; 1) OHP/OHT;

- 3) Slide;4) Flipchart;5) Papan Tulis.

18

2) Percepatan Pemberantasan Korupsi

Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini membahas tentang konsep, Indonesia, serta penyebab dan permasalahanperaturan, permasalahan seputar korupsi. percepatan strategi dan pemberantasan implementasi korupsi

Ģ Pengalaman Belajar

sikap dan perilaku baru yang akan peserta mengeksplorasi nilai-nilai seperti pendalaman materi secara mandiri, role play sampai pada yang tidak terstruktui jawab, praktek, latihan, permainan/games, terstruktur seperti ceramah, diskusi, tanya Melalui metode pembelajaran mulai dari yang Diklat ini untuk memperoleh pengetahuan, pengetahuan dalam kegiatan-kegiatan mata Selanjutnya peserta menuangkan kompetensi pembelajaran berikutnya dan dunia kerja. dipergunakannya Pemberantasan Korupsi (RM-18) belajar ke dalam resume materi Percepatan pengetahuannya di bidang ini sebagai hasi untuk mengikuti

C Hasil Belajar

peraturan, strategi, implementasi, penyebab dan permasalahan seputar korupsi, sehingga pemberantasan korupsi peserta mampu merancang langkah-langkan mampu menjelaskan konsep

٩ **Indikator Hasil Belajar** 1) Mampu menjelaskan konsep percepatan

- 2) Mampu menjelaskan peraturan tentang anti korupsi.
- Mampu menjelaskan strategi program korupsi yang berlaku di Indonesia.
- 4) Mampu percepatan anti korupsi. permasalahan seputar korupsi. menjelaskan penyebab dan
- 5 Mampu menganalisis dan merancang langkah-langkah pemberantasan korupsi

tugasnya. dan menerapkannya sesual bidang

e Materi Pokok

- Konsepsi percepatan anti korupsi;
- Peraturan perundang-undangan tentang Korupsi;
- Strategi dan program percepatan anti korupsi;
- 5) Analisis dan aplikasi pemberanatasan Penyebab dan permasalahan korupsi;

Waktu

korupsi.

4 (empat) Sesi (12 Jampel)

g. Media Pembelajaran

- 6) OHP/OHT;

- 7) *LCD;* 8) *Slide;*
- 9) Flipchart; 10) Papan Tulis.

3) Pola Pikir (Mind Setting) Pegawai Negeri

Deskripsi Singkat

PNS, dan pentingnya peranan pola pikir Pegawai Negeri Sipil yang harus dimiliki setiap Mata Diklat membahas tentang pola pikir pembentukan birokrasi pemerintah yang kuat tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyakat

Ģ Pengalaman Belajar

Diklat ini untuk memperoleh pengetahuan, peserta mengeksplorasi seperti pendalaman materi secara mandiri, jawab, praktek, latihan, permainan/games, terstruktur seperti ceramah, diskusi, tanya Melalui metode pembelajaran mulai dari yang role play sampai pada yang tidak terstruktur pengetahuan dalam kegiatan-kegiatan mata dipergunakannya dan perilaku baru untuk nilai-nilai yang akan mengikuti 3

Selanjutnya peserta menuangkan kompetensi pengetahuannya di bidang ini sebagai hasil (LKN) yang akan diterapkan ditempat kerja. belajar berupa Lembaran Komitmen Nilai-nilai pembelajaran berikutnya dan dunia kerja.

C Hasil Belajar

mampu mengatasi hambatan-hambatan yang untuk memiliki pola pikir sebagai PNS, dan akan dihadapi dalam penerapannya. Peserta mampu merancang kerangka kerja

d. Indikator Hasil Belajar

- Mampu menjelaskan konsepsi dasar pola
- 2) Mampu menjelaskan beberapa jenis pola pikir dalam dunia profesi.
- سع Mampu menjelaskan pola pikir PNS.
- Mampu mempraktekkan teknik-teknik perubahan pola pikir.
- 5 Mampu merancang perubahan pola
- 9 permasalahan dalam mengubah pola Mampu menganalisis dan mengatasi

e. Materi Pokok

- Konsepsi Dasar Pola Pikir;
- Jenis-jenis Pola Pikir dalam dunia Profesi;
- Pola Pikir PNS;
- Teknik-teknik mengubah Pola Pikir;
- Analisis dan permasalahan dalam Aplikasi Perubahan Pola Pikir;
- mengubah Pola Pikir.

Waktu

8 (delapan) Sesi (24 Jampel)

9 Media Pembelajaran

- OHP/OHT;
- LCD;
- Slide;
- 54800 Flipchart;
- Papan Tulis."

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. —

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

td.

SUNARNO

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

BAMBANG GIYANTO

0 Hasil Belajar

untuk memiliki pola pikir sebagai PNS, dan akan dihadapi dalam penerapannya. mampu mengatasi hambatan-hambatan yang Peserta mampu merancang kerangka kerja

Indikator Hasil Belajar

٩

- 2) ۳ Mampu menjelaskan konsepsi dasar pola PKIT.
- Mampu menjelaskan beberapa jenis pola pikir dalam dunia profesi.
- Mampu menjelaskan pola pikir PNS.

<u>w</u> 4

- Mampu mempraktekkan teknik-teknik perubahan pola pikir.
- 5 Mampu merancang perubahan pola DIKIT.
- 9 Mampu menganalisis permasalahan dalam mengubah pola dan mengatasi

Materi Pokok

e

- Konsepsi Dasar Pola Pikir;
- Jenis-jenis Pola Pikir dalam dunia Profesi;
- Pola Pikir PNS;
- Teknik-teknik mengubah Pola Pikir;
- Aplikasi Perubahan Pola Pikir;
- 054 Analisis dan permasalahan dalam mengubah Pola Pikir.

Waktu

8 (delapan) Sesi (24 Jampel)

Media Pembelajaran

9

- OHP/OHT;
- *LCD*;
- Slide;
- Papan Tulis." Flipchart;

13

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

pada tanggal Ditetapkan di

: Jakarta Mei 2007

KEPALA

TELEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, AL

SUNARNO